

**PENGARUH PENDIDIKAN DASAR
TERHADAP PEKERJA ANAK DI
CIBADUYUT, BANDUNG**



GRACE DONG

AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR IN-COUNTRY INDONESIAN
STUDIES (ACICIS)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

DESEMBER 2014

**PENGARUH PENDIDIKAN DASAR
TERHADAP PEKERJA ANAK DI
CIBADUYUT, BANDUNG**



GRACE DONG

AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR IN-COUNTRY INDONESIAN
STUDIES (ACICIS)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

DESEMBER 2014



HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Grace Yun Rong Dong
NIM : 2014331222
Judul : Pengaruh Pendidikan Dasar terhadap Pekerja Anak di Cibaduyut, Bandung

Penulis

Grace Yun Rong Dong

Telah diuji dalam Ujian Sidang Skripsi Program West Java Field Study Research dari The Australian Consortium for 'In-Country Indonesian Studies (ACICIS) di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Selasa, 16 Desember 2014, dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi Ph.D.
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Mangadar Situmorang Ph.D
Anggota Penguji 1

Dr. I Nyoman Sudira
Anggota Penguji 2

Elena Williams
Resident Director ACICIS

Mengesahkan,

Dr. Mangadar Situmorang Ph.D.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Sepuluh tahun yang lalu, permasalahan pekerja anak menjadi hal yang krusial khususnya di sektor alas kaki Cibaduyut, Bandung Selatan. Pada saat ini, anak-anak tersebut jarang terlihat, terutama ketika permintaan sepatu menurun. Ada berbagai macam faktor penyebab perubahan tersebut, dan yang paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi, tanpa kurikulum dan kerangka pendidikan yang kuat, anak-anak tersebut cenderung terdorong untuk turun ke dunia kerja.

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia-Tenggara yang paling berhasil dalam pencapaian tujuan pendidikan MDGs serta HDI. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperhatikan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dampak mutu pendidikan di SDN Bojongloa terhadap pekerja anak dari sudut pandangan guru-guru dan keluarga dari Cibaduyut.

ABSTRACT

10 years ago, child labour was a prevalent issue in the Cibaduyut footwear sector, South Bandung. Now, children are nowhere to be seen – particularly when demand for shoes is low. There are a variety of factors that have caused this change, of which perhaps the most prominent is increased community awareness regarding the importance of education. Yet without a solid curriculum and educational framework, these children are prone to falling back into the cycle of child labour.

Indonesia has been lifted up as a regional example in achieving the education goals of both the MDGs and HDI, and because of this, more attention needs to be focused onto the quality of education. This paper seeks to answer explore the quality of education and its relationship with child labour. Through an analysis of the quality of education at SDN Bojongloa and its effects on child labour from the perspective of teachers and families from Cibaduyut.

KATA PENGANTAR

Karya tulis ini saya persembahkan kepada Tuhan yang senantiasa memberkati saya serta saya persembahkan kepada semua staf dan murid di SDN Bojongloa dengan harapan pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Atas bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan selama semester ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- Mbak Nophie dan Staf ACICIS, khususnya Mbak Mita. Tulisan ini dan semester ini tidak mungkin berlangsung tanpa kalian.
- Bu Yuyun, Kang Ali, staf dan murid di SDN Bojongloa yang saya sudah berkesempatan bertemu – terima kasih sudah membantu saya mengerti lebih banyak tentang kehidupan kalian di Cibaduyut.
- Rigina, Ajep dan Dudu yang menemani saya ke Cibaduyut dan membantu pada saat proses penyuntingan.
- Teman-teman ACICIS, khususnya Charlotte – saya tidak dapat membayangkan semester ini tanpa persahabatan kami.
- Keluarga GKDI, khususnya Aley dan Kak Herlin yang mendukung dan membimbing saya.
- Akhirnya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas dukungan yang diberikan dalam segala hal yang telah saya lakukan sehingga karya tulis ini dapat selesai.

Grace Dong

11 Desember 2014

PENJELASAN SINGKATAN

BOS	Bantuan Operasional Sekolah Inisiatif pemerintah dalam rangka program Wajib Belajar
CBEIS	<i>Community Based Education Information System</i> Sistem kumpulan data mengenai pendidikan di komunitas yang dimulainya UNICEF
CEACR	<i>Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations</i> Badan ILO yang memeriksa pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasikan
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i> Konvensi mengenai hak anak
HDI	<i>Human Development Index</i> Indeks Pembangunan Kemanusiaan
ILO	<i>International Labour Organisation</i> Organisasi Perburuhan Internasional
Keppres.	Keputusan Presiden
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i> Tujuan Pembangunan Milenium
PDB	Produk Domestik Bruto
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SDN	Sekolah Dasar Negeri
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMTA	Sekolah Menengah Tingkat Atas
SMTP	Sekolah Menengah Tingkat Pertama
TK	Taman Kanak-Kanak
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i> Program Pembangunan PBB
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> Badan PBB untuk anak-anak
UU	Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	6
PENJELASAN SINGKATAN	7
BAB 1: PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang Penelitian	9
1.2 Identifikasi masalah	11
1.3 Batasan masalah	11
1.4 Metodologi	12
BAB 2: PEKERJA ANAK DAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA	14
2.1 Pekerja Anak di Indonesia	14
2.1.1 Faktor penyebab	14
2.1.2 Peranan keluarga	16
2.1.3 Konvensi internasional dan UU Indonesia	16
2.2 Sistem Pendidikan Indonesia	19
2.2.1 Indonesia dalam kerangka global	19
2.2.2 Mutu pendidikan	21
2.2.3 Program Wajib Belajar dan BOS	21
BAB 3: PEKERJA ANAK DAN PENDIDIKAN DI CIBADUYUT	26
3.1 Masalah pekerja anak di Cibaduyut	27
3.1.1 Sejarah pekerja anak di Cibaduyut	27
3.1.2 Pekerja anak di Cibaduyut sekarang	28
3.2 Pendidikan di Cibaduyut: SDN Bojongloa	30
3.2.1 Gambaran SDN Bojongloa	30
3.2.2 Kurikulum sekolah	31
3.2.3 Seragam dan hari Sunda	33
3.2.4 Komunikasi antara sekolah dan keluarga	34
3.3 Kehidupan setelah SD: cerita dan harapan keluarga	35
BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1 Kesimpulan Penelitian	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu dampak terburuk untuk pekerja anak adalah kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Pendidikan dasar sangat penting untuk mengatasi masalah ini karena apabila anak-anak telah memiliki ketrampilan umum, mereka akan memiliki kesadaran intelektual untuk tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan demikian hal tersebut dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak. Pendidikan dasar mempunyai dampak besar terhadap perkembangan dan peningkatan mutu generasi muda selanjutnya, oleh karena itu, pendidikan dasar harus terjamin dan bermutu.

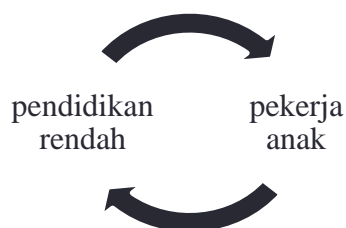
Pada sekitar tahun 1983, Indonesia menjadi negara yang sudah mencapai pendidikan dasar universal (Suharti 2013; 5). Sekarang, Indonesia telah dipandang sebagai salah satu negara teladan dalam bidang pendidikan di kawasan Asia-Pasifik, dan selama 10 tahun terkini, Indonesia adalah salah satu pemimpin dalam pencapaian tujuan MDGs poin 2, dan standar HDI mengenai pendidikan dasar. Terdapat berbagai macam hak-hak anak di Indonesia, namun, ada dua hak utama yang seharusnya dilindungi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, yaitu, hak untuk dibebaskan dari pekerjaan, dan hak untuk berpendidikan.

Akan tetapi, dalam pencapaian tujuan ini, terdapat kekurangan diskusi mengenai kualitas pendidikan, sehingga lebih fokus pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Salah satu alasan utama mengapa anak terjun ke dunia kerja adalah karena paradigma masyarakat yang melihat pendidikan yang tersedia kurang bermutu dan kurang relevan dengan masa depan anak mereka. Pola pikir yang pendek dan sederhana akibat rendahnya pendidikan masuk ke dalam lingkaran setan, yang sulit untuk dipatahkan. Selain itu, sekolah juga harus bertanggung jawab akan masalah ini karena memiliki orientasi pada jumlah siswa dibandingkan dengan kualitas dan mutu pendidikan yang disediakan oleh sekolah, sehingga mengakibatkan siswa tamatan SMA dan SD memiliki kesempatan yang sama ketika turun langsung ke dunia disiplin kerja.

Menurut Nachrowi (2004), pendidikan yang rendah dan pekerja anak adalah dua faktor yang berkesinambungan satu dengan lainnya. Ini dijelaskan sebagai lingkaran setan

seperti yang digambarkan di bawah:

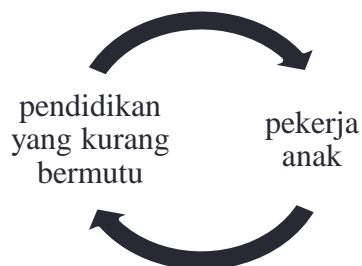
Bagan 1. Sumber: Nachrowi (2004)



Menurut lingkaran ini, pendidikan yang rendah mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sangat rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka yang berpendidikan rendah biasanya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu pendorong terbesar yang mengakibatkan mulai anak-anak terjun ke dunia kerja.

Namun, tulisan ini akan mengajukan pendapat bahwa lingkaran setan kurang tepat. Bagan berikutnya dimaksudkan bertujuan untuk menunjukkan bahwa mutu pendidikan lebih penting daripada tingkat pendidikan:

Bagan 2. Sumber: Dokumentasi Pribadi



Pendidikan rendah menjadikan anak-anak tidak memiliki ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Oleh karena itu melihat keadaan tersebut, tulisan ini akan menganalisis mengenai dampak mutu pendidikan pada masalah pekerja anak. Fokus riset ini adalah pada SDN Bojongloa, serta dengan Ketua RT yang diwawancarai di Kelurahan Kebonlega di daerah Cibaduyut, Bandung Selatan.¹

¹ Rukun Tetangga adalah ketua setiap daerah yang dipilih masyarakat.

1.2 Identifikasi masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam tulisan ini adalah produk sejarah yang bisa dibagi ke beberapa langkah :

1. Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan menyebabkan pekerja anak, dan sebaliknya. Langkah pertama untuk menghentikan lingkaran ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak bersekolah. Namun, setelah ini ada langkah berikutnya.
2. Tidak cukup jika anak hanya menghadiri sekolah saja, yang terpenting adalah bahwa mutu pendidikan harus cukup memadai. Untuk benar-benar mengatasi masalah pekerja anak, kurikulum sekolah harus sesuai dengan kemampuan anak. Pendekatan pendidikan harus melengkapi anak-anak dengan ketrampilan kognitif, emosional dan mental.

Pertanyaan penelitian adalah: apakah dampak signifikan dari kurikulum, kebijakan dan sistem sekolah di SDN Bojongloa terhadap mutu pendidikan di sekolah ini, yang mendorong pengurangan jumlah pekerja anak?

1.3 Batasan masalah

Untuk membatasi lingkup topik pekerja anak dan pendidikan yang sangat luas, studi ini berfokus kepada Ketua RT di Kelurahan Kebonglega, khususnya dampak kurikulum sekolah 2013, kebijakan sekolah dan cara mengajar di SDN Bojongloa, Cibaduyut.

Studi ini memiliki fokus geografis di daerah Cibaduyut. Daerah ini terkenal sebagai sentra produsen utama untuk alas kaki dan kulit di Jawa Barat. 10 tahun yang lalu, permasalahan pekerja anak di Cibaduyut sangat buruk. Oleh karena itu, Cibaduyut merupakan daerah yang cocok untuk melihat dampak pendidikan pada masalah pekerja anak.

Wawancara dengan warga Cibaduyut diadakan dengan 4 Ketua RT dan keluarganya di Kelurahan Kebonlega. Untuk wawancara sekolah, data dikumpulkan dari SDN Bojongloa pagi dan SDN Bojongloa siang. Tingkat SD dipilih karena hubungan

langsung dengan program WAJAR,² serta kepentingan pendidikan dasar dalam topik ini. SDN Bojongloa dipilih karena dari Ketua RT yang diwawancarai, hampir semua anak mereka bersekolah di SDN tersebut. Ada sekitar 8 guru dari SDN Bojongloa yang diwawancarai yang mengajar kelas dan mata pelajaran yang berbeda.³

Tulisan ini dilakukan dalam rangka program *ACICIS West Java Field Study* dan merupakan hasil dari rasa keingintahuan penulis akan masalah pekerja anak, dan faktor-faktor yang dapat mengatasinya.

1.4 Metodologi

Data yang digunakan sebagai penunjang dalam riset ini dikumpulkan secara kualitatif, dengan pertanyaan wawancara. Ada dua kelompok wawancara, dan fokus pertanyaan yang difokuskan,⁴ seperti yang dijelaskan di tabel di bawah. Setelah data ini dikumpulkan, analisis bisa dilakukan pada kesamaan dan perbedaan jawaban antara dua kelompok ini, dan jawaban tersebut juga bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber.

Tabel 1. Pengambilan Data

	SDN Bojongloa	Masyarakat Cibaduyut
Siapa yang diwawancarai	Guru-guru di SDN Bojongloa	Anggota rumah tangga
Jumlah orang yang diwawancarai	1 guru laki-laki, 7 guru perempuan, dari SDN Bojongloa	4 Bapak Ketua RT, 1 Ibu Ketua RT, Dari 5 Rumah Tangga
Sudut Pandang	Pandangan sebagai guru yang mempunyai hubungan langsung dengan sistem pendidikan.	Pandangan sebagai Pak/Bu Ketua RT yang mewakili komunitas.
Fokus pertanyaan	Penjelasan cara mengajar dan kebijakan sekolah,	Data mengenai anak Ketua RT dan perbandingan

² WAJAR 9 tahun merupakan suatu program pemerintah Indonesia yang mewajibkan anak yang berumur 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. WAJAR 12 tahun sedang dalam tahap percobaan.

³ Sekitar 8 guru diwawancarai, tetapi jumlah ini tidak persis. Ada juga guru-guru yang berkontribusi kepada beberapa pertanyaan tetapi tidak semua.

⁴ Seharusnya ada observasi langsung kelas tetapi ini tidak berhasil oleh karena adanya peneliti mengganggu kelas. Namun, observasi di sekolah juga mempengaruhi pengertian mengenai sekolah dan analisis data.

	pendapat guru mengenai mutu sekolah dan pendapat guru mengenai masalah pekerja anak.	generasi, pendapat mengenai sekolah sebagai orang tua, sikap komunitas terhadap masalah pekerja anak.
--	--	---

BAB 2: PEKERJA ANAK DAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

2.1 Pekerja Anak di Indonesia

Jenis pekerjaan untuk pekerja anak di Indonesia sangat luas dan menjangkau berbagai macam pekerjaan seperti buruh, pengemis, pekerja seksual dan lain-lain. Masalah pekerja anak dalam bidang tekstil dan sepatu adalah masalah yang paling buruk untuk negara-negara berkembang dan memiliki peranan sebagai negara 'produsen'. Sejak krisis moneter Asia pada tahun 1997, masalah pekerja anak dalam bidang tekstil meningkat drastis di Indonesia. Kejadian ini bertanggung jawab untuk perubahan dalam kecenderungan sektor sepatu. Setelah krisis moneter, banyak pabrik sepatu subkontrak gulung tikar, dan banyak produsen sepatu menghentikan operasinya di Indonesia. Oleh karena itu, mempekerjakan anak adalah solusi bagi para produsen untuk meningkatkan produksi namun dengan biaya produksi yang lebih murah (ILO 2004; 18).

2.1.1 Faktor penyebab

Pada umumnya, kemiskinan merupakan penyebab utama mengapa anak-anak mulai bekerja. Data ILO (2004) dan UNESCO (2005) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan terdalam dibalik ini. Diantara berbagai macam sektor, tujuan anak-anak yang bekerja adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di sektor industri manufaktur, salah satu faktor yang mendorong anak untuk bekerja adalah tersedianya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan langsung dengan menjadi buruh. Padahal di sektor industri kecil, kebutuhan tenaga kerja orang dewasa adalah faktor mengapa anak-anak tertarik bekerja (Muhidin 1997; 32). Menurut Asra (1994), dikemukakan bahwa 35 persen orang tua di Indonesia akan mengalami dampak langsung jika anak mereka berhenti bekerja, dan penurunan pendapatan rumah tangga adalah dampak utama. Kebanyakan pekerja anak bekerja karena desakan keadaan perekonomian keluarga yang lemah (Imawan 1999).

Walaupun kemiskinan adalah penyebab utama, niat anak untuk bersekolah juga terkait dengan masalah pekerja anak, dan ini disebabkan oleh sistem dan mutu pendidikan yang kurang memadai. Menurut Tjandraningsih (1995; 8), sistem pendidikan Indonesia tidak

memberikan jaminan bahwa tingkat pendidikan yang lebih baik menghasilkan tingkat hidup yang lebih baik. Apalagi, di dalam konteks perekonomian, dengan kebijakan upah minimum yang diberlakukan sama kepada semua masyarakat tanpa melihat tingkat pendidikan. Oleh karena itu, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menjadi sia-sia. Seperti yang ditekankan sepanjang studi ini, pendidikan yang kurang bermutu dan kurang bermanfaat untuk masa depan anak merupakan salah satu akar masalah pekerja anak.

Aspek penting di dalam mutu pendidikan adalah pengembangan sosial anak-anak, dan hal ini nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Namun, di luar faktor pendidikan, ada faktor lain seperti faktor sosial, budaya, demografi yang juga ikut mempengaruhi perkembangan sosial anak dan mempengaruhi terjunnya anak-anak ke dunia kerja. Kebudayaan yang mementingkan urusan rumah tangga daripada pendidikan anak dapat mengganggu kegiatan bersekolah anak-anak dan mendorong mereka untuk bekerja (Nachrowi 2004; 32). Pada hal yang terkait dengan Cibaduyut, Tjandraningsih (1994) memaparkan bahwa sistem industri kecil dengan tempat kerja yang menyatu dengan rumah dapat mempengaruhi terjunnya anak ke dunia kerja. Kegiatan di sentra industri kecil tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendorong anak-anak untuk ikut dalam kegiatan industri sebagai pekerja, baik sebagai buruh maupun sebagai pekerja keluarga atau tenaga magang.

Akhirnya, ada sebuah faktor yang terkait dengan semua penyebab yang sudah disebutkan, seperti yang dijelaskan di bawah:

Anak-anak mau melakukan apa saja yang disuruh tanpa mempermasalahkan wewenang. Anak-anak lebih banyak tidak berdaya, tidak berorganisasi untuk melawan penindasan, dan dapat disiksa secara fisik tanpa melakukan perlawanan (Nachrowi 2004; 100).

Sifat dan kemurnian anak adalah sesuatu yang harus dilindungi. Hal ini adalah alasan mengapa kepentingan guru-guru dan kepala sekolah di sekolah harus diperhatikan, apalagi kepala keluarga di dalam rumah tangga.

2.1.2 Peranan keluarga

Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan orang tua dalam masalah ini sangat penting karena orang tua memiliki pengaruh untuk mencegah atau mendorong anak-anak mereka terjun ke dunia kerja.

Banyak keluarga yang anaknya menjadi pekerja anak, ada ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan tetapi ini tidak berarti bahwa kedua-duanya tidak dapat berdampingan. Menurut Nachrowi (2004; 24), terkadang orang tua memandang bekerja sebagai cara mendidik anak, karena melengkapi mereka dengan ketrampilan praktek sekaligus mengajarkan mereka untuk mementingkan keluarga. Harus diakui bahwa memang ada anak yang membantu keluarga dengan bekerja, dan masih berkesempatan menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti bermain dan sekolah. Di sinilah terlihat perbedaan antara pekerja anak, anak yang mengalami pelanggaran hak,⁵ dan anak yang bekerja.

Dalam hal ini, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa apabila anak mereka bekerja, mereka tidak menjadi pekerja anak. Menurut Muhidin (1997; 52), kepala rumah tangga paling berpengaruh dalam menangani resiko anaknya untuk menjadi pekerja. Kepala rumah tangga, yang biasanya Bapak, pada umumnya bisa memaksa anak untuk bekerja, atau bisa mewajibkan pendidikan karena peranannya sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan bagi urusan rumah tangga.

2.1.3 Konvensi internasional dan UU Indonesia

Untuk mengatasi hal ini, sudah banyak hukum dan kebijakan yang dibentuk untuk membatasi penyebaran masalah pekerja anak. Pada tingkat hukum internasional, peraturan yang harus dicatat adalah ILO *core standards*, dan CRC. Selain itu, ada juga undang-undang Indonesia yang mencerminkan usaha Indonesia untuk memenuhi standar internasional tersebut.

Pada tahun 1950, Indonesia menjadi anggota ILO, dan sejak itu Indonesia sudah

⁵ Pelanggaran hak anak dalam konteks ini didefinisikan oleh standar-standar internasional seperti konvensi ILO dan CRC. Peraturan tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

meratifikasi 18 konvensi. Indonesia adalah negara Asia pertama yang meratifikasi semua konvensi mendasar, standar utama ILO yang paling penting untuk memastikan keadilan dalam sektor buruh, dan salah satunya adalah “*Effective Abolition of Child Labour*”.⁶ Dengan meratifikasi konvensi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan pada waktu yang teratur, dan laporan harus menunjukkan usaha negara untuk melaksanakan standar-standar yang disebutkan konvensi.

Ada dua konvensi ILO mengenai pekerja anak, yaitu Konvensi no 182 – *Worst Forms of Labour Convention 1999*, dan Konvensi no 138 – *Minimum Age for Admission to Employment*.⁷ Dua konvensi ini sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi no 182 meliputi semua anak di bawah umur 18 dan ‘jenis perburuhan anak yang paling buruk’ termasuk perbudakan, pelacuran, penggunaan anak untuk kegiatan ilegal dan pekerjaan yang kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Konvensi no 138 memaparkan umur yang paling muda untuk bekerja, dan umur ini tergantung pada beban jenis pekerjaan. Untuk Indonesia, 15 adalah usia minimum biasa untuk pekerjaan ringan yang tidak mengancam kesehatan, keselamatan atau pendidikan anak, namun umur ini adalah 12 – 14 tahun untuk beberapa negara yang berkembang. Terlihat jelas dari standar ini adalah bahwa 12 tahun merupakan usia minimum di seluruh dunia untuk mulai bekerja dengan beban ringan. Akibatnya, anak-anak dimanapun dilarang untuk bekerja ketika masih SD. Selain itu, dikarenakan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun; maka anak-anak tidak diperbolehkan bekerja ketika masih SD atau SMP menurut hukum internasional.

Hubungan Indonesia dengan ILO sudah cukup kuat dan transparan, seperti yang bisa dilihat dari kesigapannya terhadap komentar CEACR.⁸ Salah satu contoh yang sesuai adalah permintaan langsung CEACR pada tahun 2013 mengenai usaha Indonesia untuk melaksanakan “*The Worst Forms of Child Labour Convention*” 1999. Di dalam ini, CEACR meminta hasil dan data dari inistatif pemerintahan seperti *National Action Plan on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, dan keterangan mengenai

⁶ Prinsip umum lain termasuk: *Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, elimination of all forms of forced or compulsory labour, dan elimination of discrimination in respect of employment and occupation.*

⁷ Dua konvensi ini adalah konvensi utama menurut *ILO Declaration on fundamental principles and rights at work* 1998.

⁸ CEACR adalah badan ILO yang mengamati pelaksanaan konvensi yang diratifikasi negara.

kecenderungan jenis pekerjaan anak yang paling buruk. Selain itu, terdapat permintaan untuk mencegah adanya pekerja anak pada sektor industri sepatu.⁹

Badan lain yang menyangkut hal ini adalah CRC, yang mewajibkan pemerintahan negara-negara untuk memastikan perlindungan anak dari eksploitasi.¹⁰ CRC juga menekankan “*child-centered approach*” untuk pendidikan,¹¹ dan bahwa tujuan utama untuk pendidikan adalah pengembangan sifat, minat dan kemampuan setiap anak, dengan mengakui bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang unik dan berbeda masing-masing. Dalam hal mutu pendidikan, CRC menunjukkan bahwa kurikulum sekolah harus ada hubungan atau kesesuaian yang kuat dengan konteks sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi anak (UNICEF 2012; 32).

Pada tingkat domestik, sudah ada 12 undang-undang mengenai pekerja anak yang terjadi sebagai akibat ILO dan CRC.¹² Undang-undang tersebut meliputi topik seperti perlindungan anak,¹³ dukungan untuk keluarga,¹⁴ perkembangan minat anak,¹⁵ dan kesejahteraan anak.¹⁶ Terlihat jelas dari ini adalah bahwa peraturan mengenai pekerja anak dan kewajiban pendidikan sudah tertulis di dalam hukum internasional dan domestik. Namun, pelaksanaan peraturan belum adil dan konsisten. Hal ini yang mempengaruhi mutu sistem pendidikan di Indonesia (Jones 2013; 7).¹⁷

⁹ Komentar pertama ILO mengenai industri sepatu dan pekerja anak di Indonesia terdapat di dalam artikel 6 dan 7.

¹⁰ Art32(1) CRC berbunyi: “*States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.*”

¹¹ Komentar Umum No. 1 dari Artikel 29 (1) CRC menjelaskan bahwa kurikulum sekolah harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi anak.

¹² Undang-Undang ini dapat diakses di:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=IDN&p_classification=04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY.

¹³ Undang-undang Tentang Perlindungan Anak No 23/2002

¹⁴ *The Realization of Activities for the Reduction of Child Labour to Support Hopeful Family Program of 2012 (Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 7/2012).*

¹⁵ *Decree No. KEP.115/MEN/VII/2004 on Protection of Children undertaking jobs to develop talent and interest.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁷ Menurut Nachrowi, mutu sistem pendidikan sangat tergantung pada pelaksanaan 3 aspek: sumber daya keuangan, kebijakan dan pelaksanaan keuangan dan kebijakan.

2.2 Sistem Pendidikan Indonesia

Seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran setan di atas,¹⁸ pekerja anak melahirkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya pendidikan yang rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan berlanjutnya pekerja anak. Menurut riset Jones (2013; 3) akan bermanfaat untuk negara-negara yang sedang berkembang untuk investasi dalam sistem pendidikan dasar, karena sudah dibuktikan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia adalah dalam bidang pendidikan. Selain itu, pendidikan adalah salah satu tema utama yang muncul di CRC. Pendidikan sebagai sesuatu yang harus bisa diakses dan juga sebagai suatu alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup.¹⁹

2.2.1 Indonesia dalam kerangka global

Menurut PBB, Indonesia sudah lama menjadi negara teladan untuk pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah disebutkan, dengan dua standar PBB utama, yaitu, *Human Development Index (HDI)* dan *Millenium Development Goals (MDGS)*, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi pencapaiannya.

HDI adalah sebuah sistem pengukuran kemajuan masyarakat dalam pembangunan, dibandingkan dengan penggunaan PDB. HDI mempunyai tiga dimensi dasar dari pembangunan manusia, yaitu: umur yang panjang dan sehat, memiliki akses terhadap pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Dari dimensi kedua ini, ada dua komponen pengukuran, yaitu rata-rata jumlah tahun bersekolah dan jumlah tahun sekolah yang diharapkan.²⁰ Hasil kedua komponen ini disebutkan di bawah:

Tabel 2. Rata-rata jumlah tahun bersekolah,²¹ dan jumlah tahun sekolah yang diharapkan.²² Sumber: slide presentasi tanggal 2 Oktober, 2014, dalam rangka acara diskusi “Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing

¹⁸ Melihat bagan 2, halaman 10.

¹⁹ Artikel 29 menjelaskan sistem pendidikan, maupun konteks untuk pendidikan yang ideal.

²⁰ Rata-rata jumlah tahun bersekolah adalah indikator retrospektif yang menghitung rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diterima seumur hidup orang yang berusia 25 tahun dan atas. Jumlah tahun sekolah yang diharapkan mulai dari umur 6, dan menghitung total. Jumlah tahun yang diharapkan bisa diterima seorang anak dari saat pendaftaran sekolah.

²¹ *ibid.*

Vulnerabilities and Building Resilience” yang diadakan Universitas Katolik Parahyangan.

Negara	Komponen 1. Rata-rata jumlah tahun bersekolah	Komponen 2. Jumlah tahun sekolah yang diharapkan
Indonesia	7.5	12.7
Filipina	8.9	11.3
Cina	7.5	12.9
Asia Timur dan kawasan Pasifik	7.4	12.5
Kelompok pengembangan masyarakat	5.5	11.7

Dari data tersebut, terlihat bahwa dalam kedua hal ini, rata-rata untuk Indonesia jauh lebih tinggi daripada kelompok pengembangan masyarakat, dan untuk komponen 2, Indonesia adalah negara yang paling tinggi ratanya di Asia, selain dari Cina. Inilah berarti bahwa baru-baru ini HDI Indonesia dan jumlah anak yang bersekolah sudah meningkat, karena komponen keduanya yang retrospektif tinggi.

Standar PBB lain yang paling sering digunakan adalah sistem MDGs. Poin kedua dari MDGs adalah pencapaian pendidikan dasar universal. Laporan terbaru mengenai progres Indonesia dalam pencapaian tujuan MDGs dirilis pada tahun 2011. Berikut data singkatnya:

Tabel 3. Target 2A. Sumber: Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia 2011²³

Indicator		Baseline	Current	2015 MDGs Target	Status	Source
Target 2A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling						
2.1	Net Enrolment Ratio (NER) in primary education	88.70% (1992)*	95.55% (2011)**	100.00%	▶	*BPS, Susenas **MOEC
2.2.	Proportion of pupils starting grade 1 who complete primary school	62.00% (1990)	96.58 % (2011)	100.00%	▶	MOEC
2.3	Literacy rates for people aged 15-24 years, women and men	96.60% (1990)	98.78 % (2011) Female: 98.75 % Male: 98.80 %	100.00%	▶	BPS, Susenas

Status: ● Already Achieved ▶ On-track ▼ Need Special Attention

²³ Laporan 2011 adalah sumber terakhir yang dimiliki Indonesia.

Dari tabel ini terlihat bahwa perkembangan Indonesia sesuai dengan harapan. Indikator 2.1 dan 2.2 memiliki kaitan langsung dengan sekolah dasar dan menunjukkan bahwa rasio pendaftaran untuk SD sudah mencapai 95.55% dan proporsi murid SD kelas 1 yang menyelesaikan pendidikan SD sudah mencapai 96.58%. Indikator 2.3 juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting, yaitu hasil dari pendidikan SD. Rata literasi untuk yang berusia 15 sampai dengan 24 sudah mencapai 98.78% pada tahun 2011, dan ini adalah statistik yang paling tinggi dari target ini. Apalagi, Indonesia bertujuan untuk melebihi tujuan MDGs sebelum tahun 2015.

Menurut UNDP Indonesia, kekuatan HDI dan MDGs adalah kesederhanaannya, dalam hal itu data-datanya mudah untuk diakses dan dimengerti kebanyakan orang, termasuk mereka yang berasal dari negara berkembang. Akibatnya adalah bahwa ada persaingan di antara negara-negara untuk mencapai tujuan secara positif dan sederhana.²⁴ Namun, ada kelemahan juga mengenai dampak-dampak pencapaian tujuan ini. Tidak hanya nilai siswa Indonesia yang rendah, namun jumlah siswa yang mencapai nilai tertinggi jauh lebih sedikit daripada negara lain seperti Thailand dan Malaysia (Jones 2013; 5).

Pada umumnya, inti tujuan PBB tersebut adalah untuk merubah masa depan keluarga-keluarga yang menghadapi kemiskinan dan masalah yang terkait dengan kekurangan pendidikan, daripada untuk meningkatkan rata pendaftaran saja. Walaupun Indonesia sangat menonjol sebagai pemimpin dalam kedua standar ini, ketetapan kelanjutan pendidikan dasar universal sangat tergantung pada mutu pendidikan yang tersedia.

2.2.2 Mutu pendidikan

Kepentingan mutu pendidikan sudah dijelaskan sebagai faktor terpenting dalam usaha untuk menghentikan masalah pekerja anak. Akan tetapi, mutu adalah sesuatu yang sulit untuk diukur. Sistem pengukuran mutu pendidikan UNESCO menyeluruh, dan terdiri dari dua indikator, yaitu:

²⁴ Dari wawancara tanggal 2 Oktober, 2014, dalam rangka acara diskusi “*Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*” yang diadakan Universitas Katolik Parahyangan.

1. Kemampuan kognitif
2. Kemampuan emosional dan mental

Kedua indikator ini terkait dengan cara pengajaran dan kapasitas murid untuk belajar, karena indikator ini dapat mempengaruhi jangka pendidikan mereka dan angka kehadiran (UNESCO 2005; 28). Indikator pertama adalah apa yang biasanya diutamakan dalam pendidikan sebagai tujuan pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari kapasitas untuk belajar, hasil ujian dan sebagainya. Aspek kedua mengacu pada peranan pendidikan untuk mendorong pengembangan kreatif dan emosional pelajar. Hal ini lebih sulit untuk ditentukan karena tidak bisa diukur secara kuantitatif, namun dapat terlihat jika ada usaha untuk menekankan kepentingan kreatifitas, pernyataan diri, kesetaraan dan nilai kebudayaan. Menurut UNESCO, kemampuan emosional dan mental harus lebih dipertimbangkan saat kebijakan dibuat karena pendidikan adalah proses yang ditentukan secara kualitatif, daripada hanya menggunakan jumlah murid atau nilai ujian. Pendorongan kemampuan emosional dan mental menggunakan pendekatan yang berbeda di negara-negara yang berbeda, biasanya sesuai dengan kebudayaan lokal daerah masing-masing. Pada skala global, hukum internasional juga memiliki aturan yang didalamnya terdapat nilai-nilai tentang pengembangan sifat anak, bakat, dan pun kemampuan fisik harus dilindungi,²⁵ dan aspek-aspek tersebut merupakan bagian utama dalam mutu pendidikan.

Kepentingan hal ini sudah disadari badan-badan di Indonesia yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baru-baru ini sudah ada beberapa inisiatif yang dijalankan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program *Indonesia Mengajar*, yang sudah terkenal dan dipelajari Anies Baswedan, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Indonesia Mengajar* adalah proyek yang pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia dengan slogan “mendidik adalah kewajiban setiap orang terdidik”. Di program ini, tamatan luar biasa diberikan kesempatan untuk tinggal di pelosok-pelosok dan mengajarkan anak SD. Target untuk program ini adalah SD karena di tingkat ini 66% kekurangan guru. Untuk

²⁵ CRC Artikel 29,1(a) berbunyi: *States Parties agree that the education of the child shall be directed to the development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential.*

mengajar anak SD, mahasiswa dipilih karena mereka bisa menjadi teladan yang menginspirasi anak-anak dan menyebarkan optimisme.

Selain ini, UNICEF juga berusaha untuk memperbaiki kualitas data pendidikan Indonesia yang tersedia. Penelitian UNICEF (2012) menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam usaha pemerintah untuk mencapai pendidikan universal adalah bahwa data yang dimiliki tidak lengkap. Data tersebut diambil pada tingkat sekolah, dan pada anak yang hanya bersekolah. Data ini tidak menunjukkan informasi penting tentang anak yang tidak bersekolah, atau faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut tetap terjadi. Untuk mengatasi ini, pada tahun 2012, UNICEF membangun program CBEIS berkolaborasi dengan *The Center of Education Data and Statistics* sebagai alat untuk mengukur rata pendidikan pada tingkat masyarakat sekaligus juga mengidentifikasi alasan untuk bolos atau tidak sekolah, yang merupakan indikator mutu pendidikan juga.

2.2.3 Program Wajib Belajar dan BOS

Perubahan secara besar sudah terjadi di struktur sistem pendidikan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun, dalam diskusi inisiatif baru, serta dengan pelaksanaannya (Jones 2013; 1). Bisa dikatakan bahwa perubahan yang paling besar selama jangka waktu ini adalah dimulainya program “wajib belajar”, atau WAJAR.

Pasal 2 No. 18 dari UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

WAJAR merupakan suatu gerakan nasional yang dibiayai penuh oleh pemerintah. Tujuan program ini agar semua warga Indonesia berusia 7 sampai dengan 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar,²⁶ sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

²⁶ Peraturan ini sesuai dengan Wajib Belajar 9 tahun. Wajib Belajar 12 tahun sedang dalam tahap percobaan.

0306/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Fungsi WAJAR adalah untuk mengupayakan perluasan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Program ini beragam dan berusaha untuk mencakup segala macam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ini terlihat dari Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang berbunyi:

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan yang mencakup:

- (1) Pendataan dan pemetaan sekolah/kelompok belajar/kursus;*
- (2) Pengadaan tanah atau gedung SLTP;*
- (3) Pengadaan buku pelajaran/modal untuk SD Kecil dan SLTP Terbuka dan buku bacaan lainnya;*
- (4) Pengadaan peralatan pendidikan;*
- (5) Pengadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya;*
- (6) Pelaksanaan kurikulum;*
- (7) Pelembagaan;*
- (8) Penyuluhan dan publikasi; dan*
- (9) Peningkatan peran serta masyarakat.*

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa WAJAR meliputi segala macam aspek pendidikan selain dari kewajiban untuk belajar. Sebagian dari WAJAR adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan untuk masyarakat. Program ini telah dimulai pada Juli 2005 dan dampaknya signifikan dalam program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2009, pendekatan dan tujuan BOS beralih dari perluasan akses menjadi peningkatan mutu.

Dana BOS disalurkan melalui pemerintah nasional untuk sekolah-sekolah dan melalui pemerintah provinsi untuk anak-anak tertentu. Hal ini berarti bahwa RW dan RT sangat berpengaruh dalam menentukan anak-anak yang memerlukan dana BOS. Bagi anak-anak, BOS bisa digunakan untuk biaya pendaftaran, pembelian buku dan alat tulis, pembelian seragam dan lain-lain (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014). Untuk sekolah, BOS dapat digunakan untuk perbaikan gedung, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembiayaan ujian, dan sebagainya.

WAJAR sangat holistik dan merupakan lambang bagi terobosan dalam pendidikan dasar Indonesia. Apalagi, program ini juga membantu dalam memperbaiki keadaan buruh anak di Indonesia. Meskipun demikian, program ini masih mendapatkan dikritik dan kelemahannya harus diperbaiki agar program ini bisa menjadi lebih efektif lagi. Pada bab berikutnya akan tertulis pandangan orang Cibaduyut mengenai program WAJAR, dan sistem pendidikan pada umumnya di SDN Bojongloa.

BAB 3: PEKERJA ANAK DAN PENDIDIKAN DI CIBADUYUT

Pada bab ini akan digambarkan berbagai aspek hubungan antara pekerja anak dan pendidikan khususnya di Cibaduyut, dan SDN Bojongloa. Untuk mendapat pengertian sistem pendidikan terkini di Cibaduyut yang mendalam, informasi untuk bab ini semua didasarkan pada data yang dikumpulkan dari wawancara dengan 4 Ketua RT di Kelurahan Kebonlega, serta dengan kunjungan ke SDN Bojongloa. Rincian keluarga dan anak disebutkan di bawah:

Tabel 4. Rincian keluarga RT dan status pendidikan. Sumber: Dokumentasi pribadi

Anak ketua RT				
Nama Bapak atau Ibu Ketua RT (dan pendidikan tertinggi) ²⁷	Umur anak ketua RT	Nama Sekolah Dasar yang dihadiri anak	Pendidikan tertinggi anak	Status sekarang
Pak Setiawan (D3) dan Bu Trisek (SMA)	21	SDN Bojongloa	Masih belajar	Kuliah <i>Rencana:</i> menjadi calon guru olahraga di SMA
	17	SDN Bojongloa	Masih belajar	SMK <i>Rencana:</i> langsung bekerja dalam bidang pelayanan
	8	SDN Cibaduyut 5	Masih belajar	SDN Kelas 2
Pak Maman Sumantri (SMP)	32	SDN Bojongloa	SMP	Kerja – bidang sepatu
	30	SDN Bojongloa	SMP	Kerja – bidang sepatu
	28	SDN Bojongloa	SMP	Kerja – bidang sepatu
	23	SDN Bojongloa	SMP	Kerja – bidang sepatu
	21	SDN Bojongloa	SMA	Kerja – bidang sepatu

²⁷ Partisipan yang diwawancarai sudah menyetujui penggunaan nama asli mereka dalam tulisan ini.

	19	SDN Bojongloa	SMA	Kerja – bidang sepatu
	17	SDN Bojongloa	Masih belajar	SMA <i>Rencana:</i> kuliah setelah lulus SMA
Bu Iping (SMP)	37	SDN Bojongloa	SMP	Kerja – industri kimia/tekstil
	32	SDN Bojongloa	SMK	Kerja – industri kimia/tekstil
	22	SDN Bojongloa	SMA	Kerja – warehouse penjualan sepatu
Pak Muliadi (SD)	2 tahun 10 bulan	-	-	-

3.1 Masalah pekerja anak di Cibaduyut

Untuk mengerti konteks keadaan pekerja anak di Cibaduyut pada saat ini, sejarah pekerja anak di Cibaduyut harus dipaparkan terlebih dahulu.

3.1.1 Sejarah pekerja anak di Cibaduyut

Menurut Ketua RT, Pak Maman Sumantri, yang pindah ke Cibaduyut pada tahun 1981, pada tahun 1980an, daerah Cibaduyut merupakan “*kampung sepi*”, mobil jarang terlihat dan suasananya belum ramai. Namun, pada tahun 1986, gedung stasiun TVRI dibangun di Jalan Raya Cibaduyut, yang melambangkan kelahiran jalan ini. Pada tahun berikutnya, toko-toko sepatu muncul di jalan utama Cibaduyut, dan menjelang tahun 2000an setelah krisis moneter, pekerjaan subkontrak mulai menjadi populer, dan dengan ini dimunculkan pekerja anak untuk industri kecil di rumah.

Pada tahun 2004, ILO merilis sebuah kajian singkat yang berjudul “Pekerja Anak di Industri Sepatu Informal di Jawa Barat”, yang menunjukkan kecenderungan pekerja anak ini. Menurut kajian singkat ini, toko-toko sepatu berdiri di sepanjang Jalan Raya Cibaduyut, dan di belakang toko terdapat banyak pemukiman penduduk di mana mereka tinggal dan mengelola bengkel mereka. Di sini, produksi sepatu didasarkan pada pesanan dari pembeli dan bahan mentah disediakan pemilik toko. Walaupun dulu ada banyak anak yang bekerja di bengkel sepatu, kebanyakan anak bekerja di rumah enggan

membantu orang tua memenuhi pesan-pesanan yang disubkontrakkan. Pada tahun 2003, terhitung ada 256 anak-anak yang bekerja dalam industri pembuatan sepatu di Cibaduyut. Tugas mereka termasuk “*memotong kulit, mengelem dan menyempurnakan kulit menggunakan gerinda*” (ILO 2004, 36). Kebanyakan anak tersebut adalah laki-laki yang bekerja 9,5 jam per hari. Upah mingguan mereka rata-rata 35.000 rupiah, dan tidak hanya upah yang rendah, tetapi lingkungan kerja juga tidak aman dan tidak sehat. Kondisi ruangan penuh berdebu, dan ada kekurangan ventilasi yang merusak kesehatan anak karena lem dan bahan-bahan kimia yang digunakan (ILO 2004; 34-37).

3.1.2 Pekerja anak di Cibaduyut sekarang

Pada bulan Oktober dan November tahun 2014, saat kunjungan ke Cibaduyut dilakukan, anak yang bekerja sudah tidak terlihat di manapun. Salah satu warga Cibaduyut, Pak Udin yang diwawancarai dulu memiliki toko sepatu Cibaduyut selama 20 tahun. Dalam wawancaranya pada tanggal 29 Oktober 2014, dia menjelaskan bahwa selama sepuluh tahun ini, ada perubahan dari adanya pekerja anak, terhadap anak yang bekerja. Pak Udin menjelaskan bahwa sepuluh tahun yang lalu, anak-anak terlihat di hampir setiap rumah, dan mesin penjahit sangat berisik dan terdengar dari pinggir jalan. Namun, sekarang adanya anak yang bekerja bersifat musiman dan biasanya bekerja berdasarkan permintaan untuk bantuan tambahan dari anak adalah pada bulan sebelum Lebaran. Setelah Lebaran, rumah-rumah sudah tidak berisik oleh mesin penjahit dan anak-anak terlihat bermain di luar rumah.

Bukan saja wawancara dengan Pak Udin yang menunjukkan penurunan tren ini, selain itu, hampir setiap Ketua RT menceritakan bukti bahwa masalah pekerja anak sudah hampir tidak ada. Pak Setiawan dan Bu Trisek juga menyebutkan bahwa setahu mereka, hanya ada sekitar 3 atau 4 anak di seluruh Kelurahan Kebonlega yang putus sekolah. Selain itu, Bu Iping mengatakan bahwa di tempat kerja, usia buruh-buruh yang paling muda lebih dari 17. Konteks yang paling kuat dari wawancara dengan Ketua RT Kebonlega adalah bahwa keinginan anak untuk bekerja atau orang tua untuk mendorong anak bekerja, sudah menurun secara tajam.

Ada berbagai macam alasan untuk perubahan tersebut selama 10 tahun ini. Suatu tema utama yang muncul setelah wawancara dengan warga Cibaduyut adalah kenyataan

bahwa jumlah pekerja anak menurun setelah pelaksanaan Program Penghapusan Pekerja Anak dari tahun 2000 sampai 2002. Program ini terdiri dari sistem bimbingan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Selain dari itu, ada pelatihan dengan guru mengenai masalah pekerja anak agar mereka bisa mendorong anak untuk tidak bekerja.

Bagan 3. Poster ILO di ruang guru SDN Bojongloa. Sumber: Dokumentasi pribadi



Tidak bisa dipungkiri bahwa Wajib Belajar sangat membantu penurunan jumlah pekerja anak. Dampaknya sangat terasa oleh masyarakat SDN Bojongloa, dengan hasil seperti perbaikan bangunan. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa sekarang, setiap anak berkesempatan bersekolah tanpa biaya, sehingga meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, salah satu dampak dari ini menurut beberapa Ketua RT adalah bahwa anak-anak tidak didorong orang tua untuk belajar seperti 10 tahun yang lalu, karena sekarang orang tua tidak harus membayar biaya sekolah.

Selain ini, Pak Muliadi juga menyebutkan bahwa jumlah anak dari komunitasnya yang berkuliah dan memilih pekerjaan di perkantoran sudah naik, serta jumlah karyawan swasta ikut naik. Pendidikan diperlukan untuk pekerjaan yang sedang menjadi lebih

populer. Apalagi, tuntutan dari pekerjaan lokal juga naik. Kebanyakan majikan di Cibaduyut memerlukan bukti ijazah tamatan SMA sebelum mereka mempekerjakan seseorang.

3.2 Pendidikan di Cibaduyut: SDN Bojongloa

Kunjungan ke SDN Bojongloa dilakukan pada tanggal 11 dan 12 November 2014 dan wawancara diadakan dengan sekitar 8 guru yang mengajar kelas berbeda dan mata pelajaran yang berbeda. SDN Bojongloa adalah sekolah satu-satunya yang dikunjungi untuk riset ini, karena seperti yang disebutkan di Tabel 4 halaman 26, semua anak keluarga Ketua RT kecuali satu dan hampir semua anak di Kelurahan ini menjadi murid di SDN Bojongloa.

3.2.1 Gambaran SDN Bojongloa

SDN Bojongloa terletak di Jalan Raya Cibaduyut dan di dalamnya terdapat 6 SDN, yaitu, 3 sekolah pagi, dan 3 sekolah siang. Sekolah pagi mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang, dan sekolah siang berlangsung dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. 6 mata pelajaran diadakan pada hari umum, dan setiap mata pelajaran 35 menit, serta dengan waktu istirahat 30 menit. Biasanya ada 35 sampai dengan 40 anak per satu guru di setiap kelas, meskipun demikian guru memiliki kedekatan dengan tiap-tiap siswa secara yang mendalam. Walaupun fasilitas sekolah agak sederhana, ruang kelas dan gedung sekolah yang luas, penuh dengan poster informasi yang kreatif, dan suasana di sekolah yang ramai.²⁸ Dari observasi langsung di SDN Bojongloa, terlihat bahwa jumlah guru perempuan dan guru laki-laki tidak seimbang, dan untuk setiap guru laki-laki ada sekitar 6 guru perempuan. Observasi lain dari hari biasa di sekolah ini adalah bahwa ada berbagai macam kelas dan kegiatan setiap hari, termasuk kelas Bahasa Inggris, Bahasa Sunda, dan senam pagi.

²⁸ Namun, ada orang tua yang tidak menyukai hal ini dan berpendapat bahwa kedekatan SD Bojongloa dengan jalan raya utama mengganggu pembelajaran anak-anak.

Bagan 4. SDN Bojongloa. Sumber: Dokumentasi pribadi



Bagan 5. Senam pagi dengan anak-anak. Dokumentasi pribadi



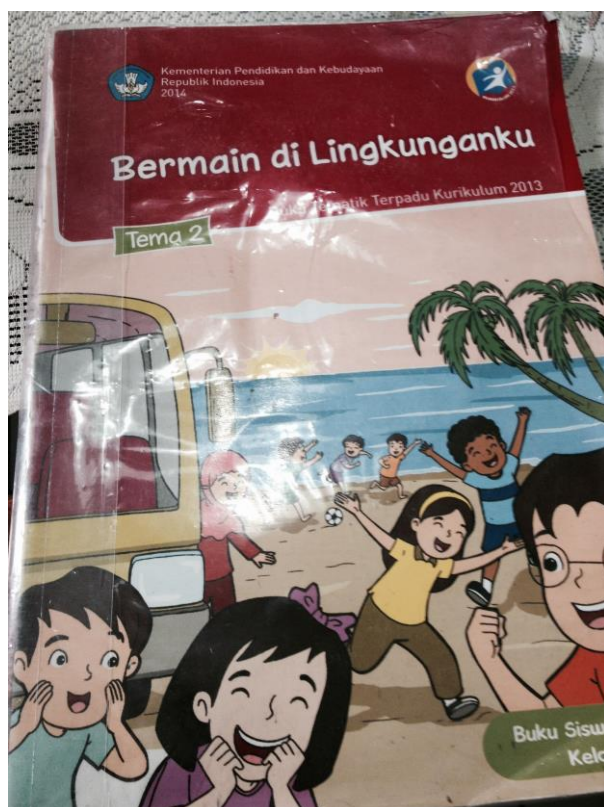
3.2.2 Kurikulum sekolah

Kurikulum sekolah ditangani dan disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum untuk setiap kelas dibagi dalam 8 tematik, yaitu 4 tematik per semester. Tematik tersebut sama untuk sekolah swasta dan sekolah negeri dan dirilis pada tahun-tahun yang berbeda untuk kelas-kelas yang berbeda. Kurikulum tahun 2013

masih dalam masa percobaan, tetapi sudah dirilis untuk beberapa kelas.

Tematik tersebut sangat berwarna-warni dan penuh dengan latihan kreatif seperti lirik untuk bernyanyi, latihan yang memerlukan tempelan foto, dan sebagainya. Kurikulum 2013 juga banyak melibatkan orang tua, karena ada tugas-tugas yang mengharuskan anak berkomunikasi dan bekerjasama dengan orangtua untuk penyelesaiannya. Guru-guru SDN Bojongloa yang bekerja sebagai guru sangat mendukung hal ini dan usaha pemerintah untuk melibatkan keluarga lebih banyak dalam pendidikan anak.

Bagan 6. Tematik 2 untuk kelas 1, yang berisi 162 halaman. Sumber: Dokumentasi pribadi



Namun, baik guru SDN maupun keluarga ketua-ketua RT menunjukkan kelemahan tematik ini, yaitu kurikulum ini terlalu penuh dan materi sekolah tidak bisa diselesaikan. Orang tua biasanya harus mengerjakan tugas dengan anak mereka setelah sekolah sampai malam. Ketua RT, Pak Setiawan dan istrinya Bu Trisek, bekerja sebagai guru di sekolah spesialis biologi, merasa bahwa terdapat materi yang terlalu banyak. Setelah selesai kerja, orang tua sudah capek, dan setelah selesai sekolah, anak sudah capek, dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama bisa sampai

beberapa jam. Menurut Pak Setiawan dan Bu Trisek, rutinitas ini agak susah, tetapi mereka pun mengakui bahwa keadaan ini lebih membebankan lagi untuk orang tua yang bukan guru.

Hal serupa juga dirasakan oleh guru SDN Bojongloa. Jika mereka tertinggal satu hari, makin lama makin banyak materi yang tertinggal, dan tujuan kurikulum tidak bisa dicapai. Namun, ada alasan lain mengapa tematik tidak bisa diselesaikan, sebagai contoh, dari observasi terlihat bahwa pada musim hujan, jika hujan mulai turun sekolah lebih cepat berakhir dan murid-murid dan guru-guru pulang bersama. Dampak ini pasti terasa oleh guru yang harus mempercepat dan mempersingkat cara pengajarannya. Namun, menurut guru, pada akhirnya, keberhasilan kurikulum ini tergantung pada kerajinan anak. Anak yang rajin belajar pasti bisa mencerna semua materi pengajaran.

Selain tematik, sistem klasifikasi penilaian juga disediakan pemerintah, dan diperbaharui secara teratur. Sepanjang semester, guru-guru mempunyai tanggung jawab untuk menilai anak-anak pada beberapa aspek. Tabel di bawah menunjukkan rubrik penilaian:

Tabel 5. Rubrik penilaian. Sumber: dokumentasi pribadi

Judul untuk bagaian Nilai	Cara memberi nilai
Observasi	Komentar
Penilaian	Jumlah
Penilaian Antar Teman	Jumlah
Jurnal	Jumlah
Penilaian Aspek Ketrampilan (Lisan, Tulis, Baca dan lain-lain)	Jumlah dan komentar
Sikap	Jumlah
Ketrampilan	Jumlah
Pengetahuan	Jumlah

Sistem ini mendahulukan keaktifan, daripada nilai, sebagai cara untuk menilai anak-anak. Guru-guru diwajibkan untuk memberikan deskripsi beserta dengan nilai untuk memastikan bahwa kemampuan anak tidak diukur dengan nilai ujian saja. Rubrik ini menunjukkan suatu pendekatan yang lebih mendalam dan mementingkan aspek kemampuan anak yang berbeda-beda.

3.2.3 Seragam dan hari Sunda

Upaya Walikota Bandung untuk melestarikan dan memelihara kebudayaan dari segi pendidikan terlihat dari seragam yang dipakai pada hari-hari yang berbeda. Di SDN Bojongloa, kebaya dipakai pada hari Rabu, batik dipakai pada hari Jumat, dan seragam pramuka dipakai pada hari Sabtu. Selain itu, pada hari Jumat, hanya Bahasa Sunda digunakan di kelas. Kebijakan seragam yang digunakan ini dapat menyatukan anak-anak untuk menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal. Namun, kewajiban ini juga sangat membebani untuk keluarga miskin. Ada seragam biasa, dua seragam budaya, dan seragam olahraga. Anak-anak yang keluarganya tidak bisa membeli ini semua merasa terbebani.

Program BOS seharusnya membantu mengatasi masalah ini. Akan tetapi, ada beberapa guru yang merasa program ini masih harus diregulasikan secara lebih teratur, karena tanggungjawab Ketua RT untuk memilih dan mendukung keluarga yang benar-benar miskin sering tidak diperhatikan dan terkadang ada dugaan bahwa keluarga yang menerima BOS merupakan keluarga yang tidak terlalu memerlukan.

3.2.4 Komunikasi antara sekolah dan keluarga

Menurut guru SDN maupun para keluarga yang diwawancarai, cara komunikasi antara guru dan keluarga sudah baik. Ada beberapa sistem yang dilaksanakan untuk memastikan ini. Sebagai contoh, jika anak sudah tiga hari tidak masuk ke kelas, guru akan menghubungi keluarga melalui SMS. Setelah ini, guru akan menulis alasan atas ketidakhadiran anak di buku penghubung dan kelas remedial bisa diatur. Selain itu, kelas tambahan bisa diatur untuk anak-anak yang ketinggalan, dengan biaya yang terjangkau.²⁹ Guru mempunyai rincian keluarga termasuk nomor kontak, alamat, umur, agama, pendidikan tertinggi dan pekerjaan. Keluarga Ketua RT yang diwawancarai setuju bahwa sistem komunikasi sudah rapi, dan mudah bagi mereka untuk menghubungi sekolah dan guru jika ada masalah.

Oleh karena itu, anak-anak di SDN Bojongloa jarang membolos. Terkadang ditemukan anak-anak pergi ke warnet pada jam sekolah, bila ini terjadi, mereka diberi peringatan

²⁹ Biasanya biaya untuk 1 jam kelas tambahan adalah 5000 rupiah.

oleh sekolah. Setelah orang tua mereka sudah diberitahu, biasanya kasus bolos tidak terjadi lagi. Cara mendisiplinkan di sekolah ini tidak begitu berbeda. Cara utamanya adalah memberikan peringatan untuk anak, dilanjutkan dengan mendekati anak atau memberitahu kesalahan mereka. Biasanya, cara ini sudah cukup tanpa harus memberikan hukuman.

Selain ini, jika ada murid yang bekerja di jalanan, guru-guru diwajibkan untuk mencari anak tersebut dan mendorong mereka untuk bersekolah lagi. Biasanya, anak-anak tersebut kembali ke bangku sekolah, meskipun masih mengamen. Guru SDN Bojongloa berpendapat bahwa akibat ini lebih baik daripada jika anak-anak tidak berpendidikan sama sekali.

Dari kunjungan ke SDN Bojongloa, terlihat jelas bahwa telah dilakukan berbagai macam usaha untuk memperbaiki segala macam aspek pendidikan seperti sistem komunikasi dengan orang tua, sistem penilaian anak, kurikulum sekolah dan lingkungan sekolah. Dengan ini, mutu pendidikan diharapkan dapat meningkat.

3.3 Kehidupan setelah SD: cerita dan harapan keluarga

Menurut guru kelas 5, persentase murid yang melanjutkan pendidikan mereka ke SMP hampir 100%. Menurutnya hanya ada satu siswa yang dia ajar selama 5 tahun ini yang tidak melanjutkan ke SMP dan kasus ini terjadi 4 tahun yang lalu. Guru ini sudah rapat dengan orang tua anak tersebut, namun, mereka sudah yakin bahwa nasib anak ini adalah untuk bekerja dan membantu keadaan perekonomian keluarga. Selama 5 tahun guru ini mengajar di SDN Bojongloa, hanya ada satu kasus yang terjadi.

Ada beberapa contoh cerita lain yang menunjukkan harapan Ketua RT untuk anak mereka, yang dipengaruhi latar belakang mereka.

Ketua RT, Pak Muliadi adalah warga asli Cibaduyut yang dulu belajar di SDN Bojongloa juga. Pak Muliadi hanya bersekolah sampai lulus SD. Setelah itu, dia langsung bekerja di bengkel sepatu. Dari kecil, dia sudah tertarik untuk membuat sepatu dan keinginannya adalah untuk bekerja daripada bersekolah. Sekarang, Pak Muliadi

mempunyai satu anak yang berusia 2 tahun 10 bulan. Dia ingin anaknya sekolah di SDN Bojongloa, dan harapannya untuk anaknya adalah “jangan seperti saya lah... anak-anak harus dapat melebihi orang tua”.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Bu Iping, yang mempunyai 3 anak. 2 dari anaknya sudah menyelesaikan pendidikan mereka. Dulu, bapak Bu Iping mempunyai dua isteri, dan setelah melihat keadaan ini, harapan Bu Iping untuk anak perempuannya dia adalah mereka menjadi perempuan yang dianggap sebagai baik, yang meneruskan pendidikan mereka dan mencapai tujuannya masing-masing. Namun, suami Bu Iping sudah meninggal saat anaknya masih kecil. Oleh karena itu, anak laki-laki Bu sangat ingin langsung bekerja daripada menyelesaikan pendidikan dasarnya. Namun, Bu Iping mendorong anaknya untuk belajar, karena menurut dia pendidikan lebih penting daripada bekerja. Menurut Bu Iping, tingkat pendidikan tidak begitu penting yang utama adalah memiliki pengetahuan yang luas.

Akhirnya, Pak Udin menceritakan pentingnya perubahan pola pemikiran. Setelah lulus SMA, kebanyakan anak masih bekerja dalam bidang sepatu, seperti yang terlihat dari tabel di atas. Namun, menurut Pak Udin, walaupun kebanyakan anak ini masih bekerja dalam sektor sepatu, pola pemikiran mereka sudah berubah. Dengan pendidikan, muncul inovasi, inovasi orang-orang mulai menggunakan teknologi, dan toko sepatu mulai menggunakan cara penjualan online. Ada lebih banyak orang yang bekerja dalam mendesain sepatu dan lebih banyak orang yang bekerja dalam pengiklanan untuk toko dan merek sepatu. Meskipun kebanyakan murid SDN Bojongloa pada akhirnya masih bekerja dalam bidang sepatu, jenis-jenis pekerjaan semakin meluas untuk orang tersebut dan apa yang paling penting adalah bahwa mereka yang bekerja bukan anak-anak.

BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan Penelitian

Tulisan ini telah menjelaskan pendidikan sebagai salah satu faktor yang membuat jumlah pekerja anak di daerah Cibaduyut menurun. Fokus tulisan ini adalah pada dampak pendidikan, dan mutu pendidikan yang berbentuk kebijakan sekolah, kurikulum, cara mengajar dan usaha sekolah untuk mengatasi masalah pekerja anak. Meskipun pada saat observasi langsung, penulis memiliki beberapa kesulitan, seperti sulit menemui anak untuk dijadikan sebagai narasumber, akan tetapi tulisan ini telah menganalisis topik ini sebaik mungkin.

Di dalam bab 1, masalah utama telah dipaparkan, yakni, bahwa jumlah pendaftar yang tinggi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pekerja anak, namun, pendidikan yang bermutu dan berkualitas lebih penting. Tulisan ini mengukur mutu pendidikan dari pandangan keluarga dan guru SDN Bojongloa mengenai berbagai aspek pendidikan di sekolah tersebut. Penjelasan konsep mengenai mutu pendidikan dijelaskan secara yang lebih mendalam dalam bab 2, sebagai sesuatu yang meliputi usaha untuk memperbaiki kemampuan kognitif, maupun emosional dan mental. Hal-hal seperti hukum internasional dan hukum domestik didiskusikan sebagai hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan didukung penuh oleh pihak keluarga. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam pencapaian tujuan PBB mengenai pendidikan ikut serta dibahas dan dianalisis implementasinya secara nyata. Apa yang ditekankan bab ini adalah bahwa pendidikan yang bermutu seharusnya merupakan hak anak, dan tanpa mutu, pencapaian tujuan internasional tidak berarti, dikarenakan siswa lulusan SD tidak memiliki kemampuan yang sepadan untuk bekerja dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan.

Bab 3 merupakan penyebutan data dari wawancara dengan guru dan keluarga di Cibaduyut. Dari Tabel 4 halaman 26, sudah terlihat bahwa semakin lama, semakin tinggi kesadaran anak terhadap pendidikan, dan semakin meningkat kualitas pekerjaannya walaupun masih di sektor sepatu. Selain itu, terlihat bahwa ada berbagai macam sistem di sekolah yang memperluas kemampuan anak seperti kreativitas, penghargaan budaya dan komunikasi yang efektif. Contohnya adalah hari Sunda dan

seragam batik, cara menilai anak yang tidak tradisional, dan cara mendisiplinkan dengan tidak memberikan hukuman. Akan tetapi, ada juga kelemahan sistem pendidikan di SDN Bojongloa, seperti kurikulum yang terlalu luas dan tidak dapat diselesaikan runtuannya sepenuhnya. Selain itu, terlihat bahwa menurut guru dan Ketua RT program ILO telah berhasil dalam penurunan jumlah pekerja anak di Cibaduyut. Dari sudut pandang Ketua RT, kebanyakan mereka puas dengan standar pendidikan di SDN Bojongloa, namun, masih ada juga yang berpendapat bahwa keterampilan praktek lebih penting daripada pendidikan dasar di sekolah.

4.2 Saranan

Didasarkan pada penelitian ini, tulisan ini menyarakan saranan berikutnya:

1. Program BOS dan WAJAR sangat penting dan sudah sangat membantu banyak anak-anak di Cibaduyut mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dengan fasilitas pendidikan yang layak. Untuk memastikan keefisienan, program ini harus dilaksanakan secara lebih jujur dan teratur dalam aspek penyaluran dari Ketua RT. Hal ini bisa dilakukan secara transparan jika Ketua RT diwajibkan untuk menunjukkan bukti keperluan untuk BOS secara lebih jelas dan terperinci.
2. Dampak program ILO di Cibaduyut sangat positif, dan sangat dipuji oleh guru-guru dan keluarga Cibaduyut meskipun sudah lebih dari 10 tahun. Aspek-aspek dari program ini, seperti bimbingan untuk murid dan pelatihan untuk guru tentang masalah pekerja anak seharusnya dapat dilaksanakan di tempat-tempat lain yang memiliki kesamaan, baik di Indonesia, maupun di negara-negara lain.
3. Tematik dan kurikulum sekolah mempunyai banyak faktor positif seperti kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak dan pekerjaan rumah yang melibatkan orang tua. Namun, kurikulum 2013 harus sesuai dengan kemampuan murid dan guru di sekolah-sekolah yang berbeda, daripada mengejar standar negara maju. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kurikulum sekolah, seperti faktor-faktor yang bisa mengganggu jam sekolah. (misalnya cuaca, terutama di musim penghujan, hari libur dan lain-lain),

perbandingan jumlah guru dengan jumlah anak, latar belakang anak-anak di setiap daerah, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum sekolah adalah salah satu hal yang paling dapat memperbaiki mutu pendidikan, dengan demikian kurikulum nasional harus diperluas supaya dapat senantiasa diadaptasikan dan diaplikasikan di sekolah-sekolah Indonesia dari berbagai pulau, kota, dan kelurahan yang berbeda.

Sepanjang penelitian ini kepentingan mutu pendidikan sudah dipaparkan. Penulis berharap bahwa kualitas dan mutu pendidikan di SDN Bojongloa dapat terus meningkat dan berkembang menjadi lebih baik, serta pendidikan menjadi prioritas warga Cibaduyut sehingga akan terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan di lingkungan warga Cibaduyut. Utamanya, anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh dunia disiplin kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, Abuzar. 1994. "Nature and Extent of Child Labour in Indonesia. ." ILO, Geneva.
- Bellamy, C. (1997). "Laporan Situasi Anak-anak di Dunia 1997." UNICEF Jakarta.
- Fields, A. Belden. 2009. "Human Rights Theory: Criteria, Boundaries, and Complexities." *International Review of Qualitative Research*.
- Hanson, Karl, and eds. Olga Nieuwenhuys. 2012. *Reconceptualizing Children's Rights in International Development*: Cambridge University Press.
- ILO. 2004. "PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SEPATU INFORMAL DI JAWA BARAT."
- Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Budaya. 2014. Accessed 1 November 2014. <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>.
- Jones, Daniel Suryadarma and Gavin W. 2013. "Meeting the Education Challenge." In *Education in Indonesia*.
- Muhidin, D Nachrowi dan Salahudin A. 1997. "Masalah Pekerja Anak dalam Perekonomian Global. Widjojo Nitiasastro 70 Tahun: Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan. ." Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nachrowi, Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Exploitasi (Sebuah Kajian Kuantitatif)*: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suharti. 2013. "Trends in Education in Indonesia." In *Education in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1995. *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*. Edited by Dr Tadjudin Noer Effendi. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1997. "Pekerja Anak: Hak Sebagai Anak VS Hak sebagai Pekerja." *Jurnal Analisis Sosial* 5 (Mei 1997):41 - 46.
- UNESCO. 2005. Understanding Education Quality. In *EFA Global Monitoring Report*.
- UNICEF. 2012. " Basic education and gender equality: Data, monitoring and evaluation." Accessed 30 September 2014. http://www.unicef.org/education/bege_61762.html.
- UNICEF. 2014. "Back to school in Polman." Accessed 28 September 2014. http://www.unicef.org/indonesia/reallives_18701.html.

Welch, A. R. 2007. "Blurred Vision? Public and Private Higher Education in Indonesia." *Higher Education*.

Wynandin Imawan, Uzair Suhaimi, Sri Sayekti, Happy Hardjo dan M. Noor. Farid. 1999. "*Survey on Economically Active Children in North Sulawesi 1998. .*" BPS, Jakarta.